

Kebenaran Sebagai Prasyarat Etis Pers

Alex Sobur

Kredo seorang insan pers (wartawan) adalah mengabdikan kepada kebenaran dan kepada publik. Maka itu, seorang wartawan memerlukan iklim kebebasan untuk bisa bekerja secara profesional, memenuhi tugasnya menyampaikan informasi yang benar dan berharga. Dalam hubungan ini, paham pers mengenai kebebasan, mengandung pelbagai unsur substansial: kebebasan untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran, namun sekaligus juga tanggung jawab tentang kadar kebenaran yang berhasil ditemukan oleh pers, serta tanggung jawab mengenai apakah implikasi dan konsekuensi dari kebebasan berita tersebut, apalagi diterbitkan secara umum dan terbuka.

Pengantar

Apakah kebenaran itu?

Tentang hal ini, ada sebuah cerita menarik dari Michael Quinn Patton (1990:460), yang ia tulis dalam bukunya *Qualitative Evaluation and Research Methods*:

Seorang lelaki muda yang tengah mengembara mendengar bahwa ada seorang sufi yang juga sedang melakukan pengembaraan. Lalu, setelah lelaki muda itu meminta menjadi muridnya, ia pun berguru kepada sang sufi tersebut, sehingga ia bisa menafsirkan apa yang dilihatnya.

Kemudian, setelah enam bulan bersama-sama melakukan pengembaraan dari kampung ke kampung, si lelaki muda itu bingung dan sedikit kecewa. Lantas, suatu ketika, ia kemukakan rasa frustrasinya itu kepada sang guru.

"Guru," katanya, "selama enam bulan ini, saya telah mengamati pelayanan yang guru berikan kepada orang-orang yang sempat guru kunjungi sepanjang perjalanan. Pada satu kampung, guru mengatakan kepada orang-orang yang lapar bahwa mereka harus bekerja lebih keras lagi di ladang mereka. Di kampung yang lain, guru mengatakan kepada orang-orang yang lapar itu untuk menghentikan keasyikan mereka dengan makanan. Di sebuah kampung yang lainnya lagi, guru mengatakan

kepada orang-orang itu untuk berdoa agar mereka bisa memanen yang lebih banyak lagi. Di setiap desa, masalahnya sama, Tetapi, pesan guru itu berbeda. Saya tidak memiliki pola kebenaran yang ada dalam ajaran guru?"

Sang guru hanya menatap lelaki muda yang juga muridnya itu.

"Kebenaran?" kata sang guru. "Anakku, ketika kau datang ke sini, engkau tidak mengatakan padaku bahwa kau ingin belajar tentang kebenaran. Kebenaran itu seperti Buddha. Bila kau temui di jalan, ia harus dibunuh. Bila hanya ada satu kebenaran untuk diterapkan ke semua kampung itu, tidak perlu lagi guru-guru sufi itu mengembara dari satu kampung ke kampung lainnya.

"Ketika kau datang pertama kali," lanjut sang guru, "kau mengatakan bahwa engkau ingin belajar bagaimana menafsirkan apa yang kau lihat selama engkau mengembara di muka bumi ini. Kebingunganmu sederhana saja; menafsirkan dan menyatakan kebenaran adalah dua hal yang berbeda."

Setelah menyelesaikan kisahnya, Halcolm, tersenyum kepada anak muda itu. "Ayo, pergilah anakku, carilah apa yang ingin kau cari, dan lakukan apa yang ingin engkau lakukan."

Dari Halcolm's *Evaluation Parables*

Cerita di atas menggambarkan, betapa sesungguhnya konsep kebenaran itu tidak mudah dipahami. Bahwa ternyata pula suatu kebenaran itu seringkali disalahtafsirkan. Bahkan, seorang Medawar (pemenang hadiah nobel kedokteran dan fisiologi, 1960) pun jelas-jelas menyatakan, “Setiap ilmuwan yang memiliki daya khayal dan daya cipta yang memadai, pasti akan melakukan kesalahan dalam hal membuat penafsiran. Dengan kata lain, ia pasti akan mempunyai pandangan yang salah atau mengajukan hipotesis yang tidak akan bertahan terhadap ulasan-ulasan kritis (Medawar, 1990:43).

Makna Kebenaran dan Teori Kebenaran

Kita memang sering salah tafsir. Apa yang kita katakan sesungguhnya hal-hal yang sebenarnya, namun ternyata salah ditafsirkan, atau salah diterima, sehingga terjadi salah paham. Akibatnya, jadi runyam. Maksud benar, jadi salah. Tindak kekerasan yang kerap terjadi dalam masyarakat kita, sering pula dikarenakan salah tafsir dan salah paham itu.

Sulitnya pemahaman terhadap konsep kebenaran ini, juga tergambar dari uraian Julienne Ford. Dalam bukunya *Faradigms and Fairy Tales* (1975), Ford, seperti dikutip Lincoln dan Guba (1985:14-15) dalam bukunya *Naturalistic Inquiry*, menegaskan bahwa kebenaran memiliki empat makna yang berbeda: pertama, *kebenaran emperik* yang dikenal ilmuwan, suatu pengakuan hipotesis atau prediksi, suatu pengukuhan atau penolakan tentang sesuatu – sesuai dengan “alam” mengungkap apa adanya.

Kedua, adalah *kebenaran yang logis*, suatu pengakuan (hipotesis atau prediksi) bila logis atau secara matematis konsisten dengan sejumlah pengakuan lain yang diketahui benar dalam kebenaran ini, atau keyakinan dasar yang dipakai dalam kebenaran lainnya (kebenaran keempat).

Ketiga, adalah *kebenaran etis*. Sesuatu diakui benar bila seseorang yang mengatakannya bertindak sesuai dengan moral atau kode etik profesinya.

Keempat, adalah kebenaran tempat kita saling

berhubungan di sini, yang disebut *kebenaran metafisik*. Tidak seperti pada pengakuan kebenaran pertama, kedua, dan ketiga, yang kebenarannya secara penuh dihubungkan dengan sejumlah norma di luar, seperti alam, logika deduktif, atau etika profesi. Keyakinan-keyakinan metafisik harus diterima begitu saja. Seperti Aristoteles mengetahui (Reese, 1980, dalam Lincoln dan Guba, 1985) dan Ford membenarkan – keyakinan dasar tidak pernah dapat dibuktikan oleh kebenaran emperik, dalam kesesuaiannya dengan alam. Keyakinan dasar mengemukakan batas akhir yang merupakan tempat segala sesuatu yang lain diuji, sebab bila terdapat sesuatu yang lebih mendasar itulah yang menjadi keyakinan dasar yang kebenarannya harus diterima begitu saja.

Jadi, istilah “kebenaran” atau apa yang disebut “benar” itu, digunakan dalam berbagai macam makna. Menurut pandangan lainnya lagi, istilah “benar” ini dalam pengertian yang ketat dan teknis, berarti deduksi sebuah argumentasi dengan cara tepat. Kita menyebut makna yang merupakan ciri khas bahasa formal ini dengan istilah “absah” atau “betul”. Istilah ini dapat juga berarti bahwa keadaan yang diungkapkan suatu pernyataan memang demikian. Di sini, pengertian ini diistilahkan dengan kata “benar” itu sendiri. Makna selanjutnya, yang menyangkut cocok tidaknya sebuah aturan atau ketentuan bagi penerapan praktis, disebut dengan istilah “dapat dilaksanakan”. Ketiga pengertian “benar” ini merupakan hasil tindakan-tindakan metodologis yang dilakukan terhadap bahasa sehari-hari. Dalam model kita, ketiga makna ini merupakan hasil penguapan air dari laut menjadi kabut dan hujan. Ketiganya merupakan aspek-aspek dari kebenaran dalam pengertian yang sebenarnya, dalam pelbagai tingkat pembatasan, yang di sini diistilahkan dengan “reliabilitas” atau sifat dapat dipercaya (Peursen, 1990:44-45).

Di sini juga, “kebenaran” dalam arti reliabilitas, mempunyai makna yang lebih intensif daripada “kebenaran” dalam arti keabsahan logis. Jika aturan-aturan logika dan teori ilmu-ilmu alam serta ilmu-ilmu kemanusiaan dianggap sebagai kebijaksanaan untuk mendekati aspek-aspek dunia

nyata ini, maka aturan-aturan dan teori-teori tersebut merupakan hasil dari interaksi antara kecerdasan manusia dan realitas, sama seperti norma-norma etis. Perbedaannya adalah bahwa aturan-aturan, yang lebih universal dari logika, matematika, dan sebagainya, bersifat lebih skematis karena mengambil jarak sebesar mungkin terhadap realitas. Sedangkan aturan-aturan etis selalu dapat diperdebatkan karena aturan-aturan ini berusaha sebanyak mungkin terlibat dalam realitas.

Dalam pada itu, orang-orang “besar” pun melihat kebenaran dari sudut pandang yang mungkin berbeda satu sama lain, sehingga dengan sendirinya melahirkan pandangan serta konsep kebenaran yang berbeda pula.

Bernard Berenson (1965-1959), misalnya, kritikus Amerika ini dalam memahami kebenaran, pernah berujar, *“Between truth and the search for truth, I opt for the second”* (Di antara kebenaran dan pencarian kebenaran, saya memilih yang kedua). Seorang filsuf Cina, Confusius (551-479 SM), meniru ucapan gurunya, *“Orang yang mengetahui kebenaran adalah tidak sama dengan orang yang mencintai kebenaran, dan orang yang mencintai kebenaran tidak sama dengan orang yang merasa senang mengerjakannya.”* Menurut Ilmuwan Swiss-Amerika kelahiran Jerman, Albert Einstein (1979-1955), *“Siapa saja yang tidak menaruh perhatian pada kebenaran dalam perkara kecil, tidak dapat diberi kepercayaan untuk menangani perkara besar.”*

“Saya,” demikian kata Johann Kaspar Schmidt (1806-1858), *“akan menjawab pertanyaan Pilatus, apakah kebenaran itu?”* Yang dimaksud kebenaran, menurut penulis Jerman yang juga pendiri anarkisme teoretis ini, *“ialah pikiran bebas, gagasan bebas, roh bebas”*. Dalam pandangan seorang penyair Amerika, Walter Whitman (1819-1892), kebenaran ialah apa saja yang memuaskan jiwa. *“Bagi setiap orang, kebenaranlah yang menjadikan dia seorang manusia,”* ucap penulis Prancis, Antoine De Saint-Exupery (1900-1944). *“Dia bertanya, lantas siapakah filsuf sejati? Saya menjawab, orang yang mencintai pandangan*

mengenai kebenaran,” jelas filsuf Athena, Plato (427-347 SM). Dalam pandangan Blaise Pascal (1623-1662), filsuf Prancis, yang juga ahli matematika, *“Orang harus mengenal dirinya sendiri. Jikalau hal ini tidak membantu untuk menemukan kebenaran, maka sekurang-kurangnya berfungsi sebagai norma hidup, dan tidak ada lagi yang lebih baik”*.

Apa kata Nietzsche tentang kebenaran? Filsuf Jerman yang punya nama lengkap Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) ini mengatakan, *“Tidak ada fakta yang abadi, sebagaimana juga tidak ada kebenaran yang mutlak”*. Sementara itu, psikolog dan filsuf Amerika, William James (1842-1910), memandang kebenaran dengan ungkapannya yang terkenal, *“There is no worse lie than a truth misunderstood by those who hear it”* (Tidak ada dusta yang lebih buruk daripada kebenaran yang salah dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya).

Jadi, kalau kita kumpulkan semua filsuf-filsuf dan kita tanyakan kepada mereka apakah kebenaran itu, maka, seperti dapat kita simak dari pelbagai pendapat di atas, mereka tidak akan sepaham mengenai makna kebenaran. “Ada beberapa yang mengatakan bahwa kebenaran adalah persamaan (korespondensi); sebagian mengatakan koherensi, sedangkan sebagian lagi pembuktian diri” (Bachtiar, 1989:8-9). Ahli lainnya lagi menyebutkan bahwa kebenaran adalah pragmatik (Hidayat, 1996:163; Suriasumantri, 1994:57). Inilah sesungguhnya teori-teori kebenaran yang telah terlembaga. Teori kebenaran selalu paralel dengan teori pengetahuan yang dibangunnya.

a. Teori Kebenaran Korespondensi

Teori kebenaran korespondensi dikenal pula sebagai salah satu kebenaran tradisional, atau teori yang paling tua, seperti dikatakan Hornie (1952), *“The correspondence theory is an old one”*.

Teori korespondensi merumuskan, “Kebenaran atau keadaan benar berupa kesesuaian (correspondence) antara makna yang dimaksudkan oleh suatu pernyataan dengan apa yang sungguh-sungguh merupakan halnya, atau

apa yang merupakan fakta-faktanya” (Kattsoff, 1986). Atau, dalam pengertian yang lebih jelas lagi, “Sebuah statemen dikatakan benar jika terdapat korelasi positif antara pernyataan dan kenyataan” (Hidayat, 1996:162).

Jadi, bagi penganut teori korespondensi, maka suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi (berhubungan) dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut.

Eksponen utama dari teori korespondensi adalah Bertrand Russell (1872-1970).

b. Teori Kebenaran Koherensi

Teori ini dikembangkan oleh Plato (427-347 SM) dan Aristoteles (384-322 SM) berdasarkan pola pemikiran Euclid dalam menyusun ilmu ukurnya.

Teori koherensi atau teori konsistensi menyebutkan bahwa suatu pernyataan atau pun proposisi dikatakan benar jika tidak bertentangan dengan hukum penalaran logis; misalnya, kebenaran dalam ilmu matematika yang berada di alam pikiran. Di sini, pemikiran dan pengetahuan yang tidak logis, tidak rasional, tidak dianggap benar. “Suatu proposisi,” demikian Kattsoff (1986), “cenderung benar jika proposisi tersebut dalam keadaan saling berhubungan dengan proposisi-proposisi lain yang benar, atau jika makna yang dikandungnya dalam keadaan saling berhubungan dengan pengalaman kita”.

Selanjutnya, cerita berikut ini kiranya bisa menggambarkan secara tepat apa yang dimaksud dengan teori koherensi atau teori konsistensi (Suriasumantri, 1994).

Seorang anak kecil yang baru masuk sekolah, setelah tiga hari berselang, mogok tidak mau belajar. Orang tuanya mencoba membujuk dia dengan segala macam daya, dari iming-imingan gula-gula sampai ancaman sapu lidi, semuanya sia-sia. Setelah didesak-desak, akhirnya dia berterus terang bahwa dia sudah kehilangan hasratnya untuk belajar, sebab ternyata ibu gurunya adalah seorang pembohong.

“Coba ceritakan bagaimana dia berbohong,”

pinta orang tuanya sambil tersenyum.

“Tiga hari yang lalu dia berkata bahwa $3 + 4 = 7$. Dua hari yang lalu dia berkata $5 + 2 = 7$. Kemarin dia berkata $6 + 1 = 7$. Bukankah semua itu tidak benar?”

Persoalan yang sederhana ini membawa kita kepada apa yang disebut teori kebenaran. Apakah persyaratannya agar suatu jalan pikiran menghasilkan kesimpulan yang benar?

Tidak semua manusia mempunyai persyaratan yang sama terhadap apa yang dianggapnya benar, termasuk anak kecil kita tadi, yang dengan pikiran kekanak-kanakannya mempunyai kriteria kebenaran tersendiri. Bagi kita, tidak sukar untuk menerima kebenaran bahwa $3 + 4 = 7$; $5 + 2 = 7$; dan $6 + 1 = 7$; sebab, secara deduktif dapat dibuktikan bahwa ketiga pernyataan tersebut adalah benar. Mengapa hal ini kita sebut benar? Sebab pernyataan dan kesimpulan yang ditariknya adalah konsisten dengan pernyataan dan kesimpulan terdahulu yang telah dianggap benar.

c. Teori Kebenaran Pembuktian Diri

Kebenaran itu ada dan mempunyai nilainya sebagai kebenaran karena hakikat yang ada pada dirinya sendiri. Kebenaran terlepas dari penerapannya. Kebenaran selalu berubah karena munculnya penemuan-penemuan baru. Kebenaran, sebagaimana yang tersirat dalam pengajaran atau pun dalam penelitian, terwujud dalam pernyataan-pernyataan yang berlandaskan pada bukti-bukti dan atau pembuktian yang sah, sesuai dengan metode yang berlaku (Suparlan, dalam Shils, 1993:xvii-xviii).

Untuk pembuktian kebenaran, Prof. Noeng Muhadjir membedakan enam model logika, yaitu: (1) logika formil Aristoteles, (2) logika matematik deduktif kategorik, (3) logika matematik induktif kategorik, (4) logika matematik probabilitistik, (5) logika deduktif probabilitistik, dan (6) logika reflektif (Muhadjir, 1996:192-194).

Pada *logika formil Aristoteles*, emperi diuji-cocokkan dengan premis mayornya atau tesisnya atau teorinya atau *nashnya*, untuk diambil kesimpulan apakah premis minor (atau hasil analisis

emperi) cocok dengan premis mayornya ataukah tidak. Jika tidak cocok, premis minor ditolak. Asumsi kita pada model logika Aristoteles tersebut: tesis atau teori atau *nash* itu, mutlak benar. Sejarah ilmu pengetahuan membuktikan bahwa cara pembuktian demikian bukan menghasilkan pengembangan ilmu, melainkan hanya menghasilkan pembenahan ilmu.

Logika matematik deduktif berangkat dari kalkulus jenis. Sesuatu itu ditetapkan implisit atau eksplisit terhadap sesuatu, sehingga logika tersebut disebut logika matematik deduktif kategorik. *Logika matematik kategorik* berangkat dari tujuh aksioma matematik, yang diubah menjadi aksioma kelas dan subkelas. Logika ini berangkat dari hukum, dalil, *theorem*, dan juga berangkat dari asumsi, aksioma, dan postulat.

Dalam *logika matematik induktif kategorik* – yaitu logika yang berkembang marak bagi studi ilmu kealaman – seperti sensual dan konstruksi logik sejumlah emperi sensual dipakai untuk mencari kebenaran. Bertolak dari ontologi yang berbeda, logika induktif ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda pula. Positivist melalui logika induktif tersebut mencari hokum atau prinsip yang diharapkan berlaku umum.

Selanjutnya, *logika matematik induktif probabilistik*, bertolak dari emperi yang dikonseptualisasikan secara probabilistik. Kebenaran dibuktikan secara induktif mendasarkan pada frekuensi sebagai probabilitas kebenaran relatif.

Logika deduktif probabilistik berangkat dari *grand theory* atau *grand concept* kebenaran objektif universal yang luas dan rentang kebenaran ditampilkan probabilistik. Artinya, pada bagian-bagian marginal, dugaan keberlakuannya *grand theory* tersebut perlu diuji sesuai-tidaknya emperi dengan *grand theory*-nya.

Kemudian, yang diunggulkan dalam logika reflektif adalah kemampuan rasio manusia untuk menangkap yang esensial dari emperi yang dihayati. Bukan emperi yang banyak menentukan, melainkan terungkapnya esensi dari materi emperi yang diperoleh. Prosedur berpikir yang digunakan sangat beragam, seperti berpikir horizontal, divergen, kreatif, dan heterarkhik. Argumentasi dan

ekplisitasi cara berpikir yang dapat dipantau oleh pihak lain itulah jaminan kebenaran isi yang ditampilkan.

d. Teori Kebenaran Pragmatik

Pencetus teori ini adalah Charles S. Peirce (1839-1914), kemudian dikembangkan oleh beberapa ahli filsafat yang kebanyakan berkebangsaan Amerika yang menyebabkan filsafat ini sering dikaitkan dengan filsafat Amerika. Ahli-ahli filsafat ini di antaranya adalah William James (1842-1910), John Dewey (1859-1952), George Herbert Mead (1863-1931), dan C.I. Lewis (Suriasumantri, 1994:57).

Menurut teori pragmatik, sebuah teori dikatakan benar jika ternyata mendatangkan dayaguna yang positif (Hidayat, 1996:163). Teori ini dianut, misalnya, dalam dunia kedokteran. Sebagai salah satu contoh, sebuah formula obat-obatan dikatakan benar kalau terbukti menyembuhkan sang pasien. Tetapi, kebenaran pragmatik ini akhirnya akan bersifat relatif dan individual karena obat yang sama belum tentu berlaku bagi pasien lain.

Selain keempat teori kebenaran seperti diuraikan di atas, sebetulnya masih terdapat beberapa teori kebenaran lainnya. Abbas Hamami (1996), misalnya, menyebutkan teori yang lain itu: teori kebenaran sintaksis, teori kebenaran semantis, teori kebenaran non-deskripsi, dan teori kebenaran logik yang berlebihan (*logical-superfluity or truth*).

Sementara itu, kita pun dalam kehidupan sehari-hari sering menggunakan atau memakai kata “kebenaran” dalam pelbagai arti, yang sebetulnya tidak kita butuhkan dalam teori kebenaran. Kita mungkin mengenal perkataan “berkata benar”, yang berlawanan dengan “berdusta”, “berkhayal” atau “berolok-olok”, dan seterusnya. Bahwasanya orang bersedia berkata benar, artinya tidak akan berdusta, bahkan akan tetap berkata benar hingga akhir, itulah bahasa filsafat. “Eufemisme”, sindiran, dan yang lainnya, pun turut memegang peranan pula dalam kritik filsafat; sebab, seorang ahli filsafat juga hidup sebagai manusia-manusia dan harus bergaul dengan mereka.

Dalam konteks komunikasi, Karl Jaspers, sebagaimana dikutip Peursen (1991: 227-228), pernah mencoba mengklasifikasikan macam-macam komunikasi yang terdapat dalam hubungan antarmanusia. *Diewahrheit beginnt zu zweien*, kebenaran mulai mendua. Artinya, kebenaran yang sepenuhnya baru, dapat dihayati bersama dalam komunikasi. Tetapi, komunikasi itu ada macam-macam: ada komunikasi yang vital, yang menyangkut pokok-pokok kehidupan; ada komunikasi intelektual, dan ada komunikasi rohani. Dalam komunikasi pertama, seolah-olah kontak terjalin lewat naluri: dalam kesebelasan yang juga dilatih secara mental, maka semangat kerukunan dan kerjasama dibina lewat komunikasi ini. Komunikasi kedua terjadi dalam suatu uraian ilmiah, di mana dipakai bahasa yang jelas dan univok, sehingga tak mungkin terjadi salah paham. Pengaruh emosi dapat mengganggu komunikasi, maka dari itu bahasa yang logis hendaklah diutamakan. Komunikasi rohani terjadi, bila anggota-anggota suatu kelompok bersama-sama menghayati cita-cita rohani yang sama.

Namun puncak komunikasi, demikian Jaspers, tidak tercapai dalam salah satu bentuk komunikasi itu, melainkan dalam akarnya, yaitu pribadi-pribadinya sendiri, yakni dalam komunikasi eksistensial yang dapat terjadi dengan tiba-tiba, dengan tidak memakai kata-kata. Dua orang saling mengerti seolah-olah dari dalam. Komunikasi ini tidak bisa dipaksa-paksa, tidak bisa dipancing-pancing dengan mengucapkan mantera-mantera, tetapi hanya bisa dicapai bila dua orang secara spontan membuka diri yang satu terhadap yang lain; secara sukarela menyerahkan diri pribadi kepada yang lain.

Dalam pemahaman agama, ada dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kaitannya dengan konsep kebenaran, yaitu sumber otoritas atau justifikasi dan metode untuk memperolehnya (Hidayat, 1996:160). Sumber otoritas dari kebenaran agama adalah wahyu dari Tuhan. Oleh karenanya, konsep kebenaran dalam pemahaman agama selalu dirujuk kepada apa yang dikatakan wahyu. Pada umumnya, metode yang digunakan adalah deduktif-normatif, yaitu

berangkat dari premis ataupun statemen ayat, lalu dijadikan alat evaluasi moral dan perilaku keagamaan.

Dalam ilmu pengetahuan, menurut Komaruddin Hidayat, metode yang banyak digunakan adalah induktif, yaitu melalui suatu eksperimentasi. Di sini, kata Hidayat, tak ada figure yang memiliki otoritas kebenaran, kecuali metode dan hasil pengujian sebuah hipotesis. Karena itu, justifikasi sebuah kebenaran ilmiah terletak pada prosedur dan hasil pengujian, bukan pada keyakinan metafisis seperti kebenaran wahyu. Hal ini tidak berarti bahwa kandungan kitab suci tidak memiliki kualitas ilmiah, melainkan yang ingin ditekankan adalah sumber otoritas dari sebuah kebenaran.

Terlepas dari segala teori kebenaran yang ada, kebenaran dalam aktualisasi tertinggi memang *kebenaran ilahiyah*, kebenaran yang diajarkan Allah swt kepada manusia. Umat Islam patut bersyukur karena ada tempat konsultasi yang lebih daripada kebenaran etik insaniyah, yaitu apa yang oleh Noeng Muhadjir disebut sebagai *kebenaran integratif ilahiyah*. Disebut kebenaran demikian, karena kebenaran yang terkandung dalam al-Quran dan hadis memberikan kepada manusia: ayat, isyarat, *hudan*, dan sekaligus rahmah.

Kebebenaran sebagai Etos Pers

“Etos” bisa diartikan sebagai sikap dasar seseorang atau sekelompok orang dalam melakukan kegiatan tertentu. “Etos pers” berarti sikap dasar pers dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya. Istilah “kebebenaran” itu sendiri dalam konteks ini ialah memberitakan keadaan yang sebenarnya. Kebebenaran – pengetahuan tentang keadaan yang sebenarnya – adalah salah satu nilai paling vital dan oleh sebab itu paling mendasar bagi manusia.

“Etos dasar pers tidak lain adalah etos kebenaran” (Magnis-Suseno, 1988:122). Ini berarti, apapun yang disajikan pers harus benar. Pers harus merasa terlibat terhadap kebenaran. Pers, sebagaimana dikatakan Magnis-Suseno, mempunyai dan boleh mempunyai pelbagai tujuan

dan harapan, tapi tak pernah tujuan-tujuan dan harapan-harapan itu boleh dikejar dengan menyampingkan kebenaran. Kebenaran adalah prasyarat etis bagi segala usaha pers. Semua harapan dan tujuan lain, seperti: agar pers mendukung perkembangan masyarakat, menggelorakan semangat pengabdian, mempertebal rasa tanggung jawab masyarakat, menyebarluaskan kebudayaan nasional, adalah baik dan penting serta sangat perlu ditegaskan kembali, tetapi hanya dapat mempertahankan martabat moralnya kalau dijalankan sesuai dengan etos dasar pers: *pers wajib untuk menyajikan kebenaran, seluruh kebenaran, selalu, dengan sebenar-benarnya*. Tanpa didasari etos kebenaran, segala maksud baik yang hendak dicapai melalui pers, terkena kanker korupsi mental karena dirusak oleh kebodohan.

Kredo seorang insan pers (wartawan) adalah mengabdikan kepada kebenaran dan kepada publik. Maka itu, seorang wartawan memerlukan iklim kebebasan untuk bisa bekerja secara profesional, memenuhi tugasnya menyampaikan informasi yang benar dan berharga. Dalam hubungan ini, paham pers mengenai kebebasan mengandung pelbagai unsur substansial: kebebasan untuk mencari dan mengungkapkan kebenaran, namun sekaligus juga tanggung jawab tentang kadar kebenaran yang berhasil ditemukan oleh pers, serta tanggung jawab mengenai apakah implikasi dan konsekuensi dari kebebasan berita tersebut, apalagi diterbitkan secara umum dan terbuka. Karena itu, tidaklah mengherankan jika sementara orang selalu menekankan agar pers mengembangkan semaksimal mungkin aspek positif yang dimiliki pers itu sendiri. "Pers boleh menulis kekurangan dalam proses pembangunan, tetapi diminta agar mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Kalau sebuah kebenaran yang ditulis ternyata menimbulkan malapetaka, pers supaya menghindarinya" (*Media Indonesia*, 10 Februari 1993).

Memang, kebenaran itu harus disampaikan "meski terasa pahit", namun tidak semua kebenaran harus segera disampaikan. Boleh jadi, ada juga yang harus ditangguhkan. Lihatlah dulu siapa

sasarannya, dan pelajari juga apakah informasi itu dapat mereka cerna atau tidak. Jika semua positif, pelajari lagi adakah manfaatnya? Inilah sebenarnya *check and recheck* dalam makna yang lebih luas tentang suatu pemberitaan.

Berkenaan dengan ini, pakar hadits Nabi, Addarimy (798-869) dalam *Sunan*-nya, seperti dikutip Shihab (*Republika*, 9 Februari 1993), menuliskan sebuah nasihat yang terasa sangat relevan dengan kehidupan pers kita; katanya, "*Jangan sampaikan yang dangkal kepada ilmuwan, mereka akan membencimu, jangan pula yang amat dalam, kepada awam, mereka akan mendustakanmu, jangan menghalangi informasi bagi yang butuh, Anda akan berdosa, tetapi jangan menyampaikannya kepada yang tak paham, agar Anda tidak menganiaya. Ada hak dan kewajiban menyangkut apa yang Anda tahu, demikian pula menyangkut apa yang Anda miliki*".

Senada dengan itu, Pasal 2 Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, menyebutkan: "Wartawan Indonesia dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan berita, tulisan, atau gambar, yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu golongan yang dilindungi undang-undang".

Jadi, sifat "*justman*" atau "pertimbangan" inilah yang mesti dimiliki bagi para insan pers. Segala sesuatu yang akan ditulis atau diberitakan haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah tulisan atau berita itu tidak akan mengganggu ketenteraman umum, atau akan mengalihkan perhatian terhadap pembangunan negara dan bangsa yang tengah maju dan berkembang, dan sebagainya. Dalam hal ini dituntut pula dari setiap wartawan, sifat "mawas diri" sebagai salah satu jalan agar misi persnya mendapat dukungan, tidak saja dari masyarakat, tetapi juga dari pemerintah.

Era kita sekarang, dikenal sebagai era informasi; dan informasi itu bisa berdampak positif, bisa juga negatif, sehingga diperlukan kesadaran serta tanggung jawab besar dalam menyampaikan

dan menerimanya. Dalam ajaran Islam, peringatan untuk maksud itu cukup banyak. “Yang Anda ketahui, menjadi tawanan Anda, tetapi begitu diinformasikan, maka Anda menjadi tawanannya.” Sungguh tepat kiranya apa yang diungkapkan M. Quraish Shihab dalam rubrik “Resonansi”-nya (*Republika*, 9 Februari 1993), “Jangan duga Anda dapat mengelak, karena: *Ada pengawas yang selalu hadir dalam setiap ucapan yang disampaikan.* Ini bukan dekrit pemerintah yang tercantum dalam lembaran negara, tetapi itu adalah peringatan penguasa langit dan bumi, yang dicantumkan dalam lembaran Kitab Suci (Q.S. 50:18).

Meski kerap diingatkan, kebebasan yang semestinya guna mencari dan mengungkapkan kebenaran, sering disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, kepentingan golongan, dan kepentingan bisnis; karena betapapun juga, pers dalam era sekarang ini sudah menjadi industri. Di sini, hukum-hukum besi perdagangan dan industri berlaku, sehingga kerap menimbulkan kontroversi antara kepentingan masyarakat banyak dengan kepentingan orang perorang, serta bisnis pers itu sendiri. Yang terancam adalah kembali “kebenaran” dan “kebebasan”.

Hormat terhadap kebenaran, demikian Magnis-Suseno, berarti hormat terhadap manusia sendiri. Tidak menghormati kebenaran berarti menghina manusia. Seratus kalimat bagus tentang tanggung jawab pers, tidak akan menghilangkan rasa jijik kalau dengan kata-kata itu ditutup dosa terhadap kebenaran. Siapa yang akan menggerogoti kebenaran, berarti menggerogoti martabat manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Kesanggupan untuk memahami kebenaran merupakan mahkota manusia yang membedakannya dari makhluk-makhluk lain. Hormat terhadap kebenaran, sekaligus menunjukkan suatu etos kebebasan, karena dengan mengajukan kebenaran kita menghormati kesanggupan manusia untuk mengambil sikap sendiri terhadap realitas. Kita memperlakukan dia sebagai manusia yang dewasa.

Walaupun begitu, makna kebenaran itu bagi wartawan sendiri biasanya sukar dipahami, dan

objektivitas mungkin cuma ilusi (Rivers dan Mathews, 1994:52-53). Dalam kenyataannya di lapangan, bisa jadi wartawan tidak memahami berita yang tengah mereka liput; mereka mendatangi sumber-sumber yang keliru, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lemah, membuat penilaian buruk, menekankan justru titik-titik yang salah, menuliskan berita secara tidak cermat, dan tidak mengecek ulang berita yang ia tulis. Bagi redaktur, yang juga mungkin saja salah menakar nilai beritanya, biasanya, atau latar belakang pendidikan publiknya. Pada gilirannya, masing-masing anggota publik tersebut memahami berita itu secara sendiri-sendiri.

Meskipun mengakui bahwa subjektivitas, selektivitas, dan ketidaklengkapan akan selalu mempengaruhi pelaporan berita, sebagian pakar dan praktisi menyatakan sebagian besar objektivitas dapat dicapai. Donald McDonald, seperti dikutip Johannesen (1996:214), menganjurkan pandangan ini dan memahami objektivitas bukan sebagai kebenaran total tentang suatu hal, dan bukan sebagai ketidakhadiran semua subjektivitas, melainkan sebagaimana diajukan pada tahun 1947, oleh Komisi Hutchins tentang Kebebasan Pers: “...laporan yang jujur, menyeluruh, dan cerdas tentang kejadian sehari-hari dalam konteks yang memberinya makna.”

Syarat Kebenaran Berita

Berita itu bisa keliru. Berita itu juga bisa dikelirukan. Ini berarti bahwa kesalahan berita yang tercetak dalam surat kabar itu bisa saja karena keterbatasan wartawan, karena sifat-sifat manusiawi mereka, namun juga karena ada unsur kesengajaan.

Bagaimana cara pers mengubah, memalsukan, dan melenyapkan berita? Ada banyak kemungkinannya, antara lain (Adinegoro, 1961):

(1) Bagian yang penting dari berita itu dilenyapkan oleh si wartawan yang berkepentingan, dengan maksud supaya si pembaca jangan mengetahuinya. Oleh si redaktur telah diadakan sensor sendiri terhadap publiknya. Yang bisa merugikan surat kabarnya, atau

golongannya, atau partainya, dicoretnya, atau sama sekali dilarang untuk diberitakan. Dengan demikian, publik sengaja tidak diperbolehkan mendapat gambaran yang sebenarnya tentang peristiwa atau gejala yang dijadikan berita itu; mereka takut kalau-kalau pembaca mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya.

(2) Bagian yang tidak penting, dibesarkan kepentingannya; hal yang besar artinya, dikecilkan; yang seharusnya pendek, dipanjang-panjangkan. Si "A", yang tidak penting di mata umum, tetapi dianggap penting untuk mempropagandakan partai "X", sewaktu dia meninggal, diberitakan panjang-panjang; sedangkan si "B", yang jauh lebih penting di mata orang banyak, sewaktu meninggalnya hanya diberi porsi lima baris saja.

(3) Melenyapkan sama sekali satu berita supaya tidak diketahui publik dan menyiarkan satu berita yang bertentangan yang dianggap "menguntungkan".

(4) Memalsukan berita kejadian dengan membuat-buat berita untuk sesuatu maksud tertentu.

(5) Memakai cara yang tidak *fair* untuk menyesatkan anggapan pembaca terhadap seseorang atau sesuatu partai; umpamanya, dengan menggunakan kata-kata yang mengejek atau mencemooh dengan sengaja, untuk menyesatkan publik ke arah yang mereka kehendaki.

Terhadap berita-berita yang mungkin diubah, dipalsukan, atau dibikin-bikin itu, memang dapat menyesatkan pembaca yang tidak menyaksikan langsung, atau mengetahui sendiri kejadian yang diberitakan. Di sini, pembaca sepertinya sama sekali tidak berdaya. Pantaslah kalau jauh-jauh hari Tuhan telah mengingatkan lewat pesan-Nya, "*Apabila datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka selidikilah, agar kesulitan tidak engkau timpakan kepada satu kelompok, akibat ketidaktahuan, dan bila itu terjadi, maka pasti kamu akan menyesal akibat ulahmu...*" (Q.S. 49:6).

Seorang wartawan yang bekerja tanpa waktu dalam medan yang menyenangkan dan

membahayakan, selalu diburu, selalu digegas waktu. Walaupun ia mendasarkan prinsip kerjanya pada *check and recheck* (periksa dan periksa ulang) serta mengutamakan *accuracy* (ketelitian), ia sering dihadapkan kepada pelbagai kekeliruan.

Kekeliruan berita itu sesungguhnya mengakibatkan macam-macam kerugian, beberapa di antaranya:

(1) Wartawan dan penerbitan persnya mendapatkan nama buruk di mata masyarakat. Bila pemberitaan pers sering mengada-ada, akhirnya masyarakat akan bisa menilai sendiri, integritas pers yang demikian akan hilang dan masyarakat enggan membacanya, yang pada gilirannya pers tersebut akan mati dengan sendirinya.

(2) Bisa mengacaukan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Jika kekeliruan itu bersifat prinsipil, dapat mengganggu stabilitas nasional dan lebih jauh lagi berakibat terhambatnya pembangunan nasional.

(3) Wartawan atau penerbitan persnya bisa dituntut ke pengadilan.

(4) Sumber berita atau pihak-pihak yang terkait denggan pemberitaan itu dapat menderita kerugian.

(5) Publik mendapat informasi yang salah, sehingga pandangan mereka mengenai sesuatu hal juga menjadi salah; dengan kata lain, kekeliruan berita dapat menyesatkan pembaca.

(6) Dalam hal pemerintah masih memberlakukan surat izin terbit bagi penyelenggaraan penerbitan pers, maka pers yang seringkali melakukan kekeliruan, tidak mustahil dikenakan pembredelan.

Apa sebabnya pers itu sering berbuat kekeliruan? Sebabnya pun bisa bermacam-macam, antara lain karena: (Wonohito, 1960: 27)

- (1) kelengahan atau kelalaian redaksi;
- (2) wartawan bersangkutan memang senang sensasi;
- (3) menaruh sentimen buruk;
- (4) kurang pandai dalam hal mengadakan wawancara.

Lantas, apakah syaratnya agar berita itu benar? Berita yang benar ialah berita yang sedemikian rupa sehingga pembaca sungguh-

sungguh memperoleh informasi yang sebaik-baiknya mengenai sesuatu peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat. Dengan kata lain, berita yang benar itu ialah berita yang objektif. Dalam hal ini, objektivitas memang merupakan tujuan yang luhur, namun untuk mencapainya tidaklah mudah. Kendatipun demikian, haruslah diusahakan.

Ada beberapa usaha yang dapat mendekati objektivitas atau kebenaran berita, yakni: *bersikap jujur, menghindari kata-kata opinionatif, dan membubuhkan aspek-aspek yang relevan* (Effendi, 1986:144-145).

1) Bersikap jujur

Pada dasarnya, kejujuran merupakan tuntutan dasar etika jurnalistik. Bersikap jujur dalam jurnalistik berarti melaporkan peristiwa yang dilihat sebagaimana adanya: tidak mengada-ada dan tidak meniadakan, tidak memperbesar dan tidak memperkecil, tidak menambah dan tidak mengurangi, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Jujur berarti mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri. Ini adalah masalah hati nurani. Seorang wartawan yang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, dengan sendirinya akan mempunyai rasa tanggung jawab sosial dan rasa tanggung jawab nasional. Dalam menangani masalah sosial atau nasional, hati nuraninya akan ikut berbicara.

2) Menghindarkan kata-kata opinionatif

Kata-kata opinionatif (*opinionative*) mengandung nilai-nilai tertentu yang sifatnya kontroversial. Menimbulkan pendapat yang berbeda.

Seorang wartawan yang melaporkan suatu peristiwa, umpamanya, dengan menulis kata-kata-marah, sedih, kecewa, cantik, jelek, hebat, dan sebagainya, belum tentu demikian pendapat khalayak. Akan lebih objektif jika kata-kata opinionatif diganti dengan kalimat deskriptif, misalnya:

Untuk menghilangkan kata “cantik”, penulis menggantinya dengan contoh berikut:

Matanya yang besar mengambang pada wajah kuning langsung yang dihiasi rambut hitam memanjang. Ia tidak memakai make-up karena, “Saya tidak percaya make-up bisa memikat pria.

Kalaupun saya memerlukannya, saya tidak akan memakainya.

Dengan teknik ini, penulis memberikan gambaran konkret untuk membantu pembaca membayangkan wanita itu. Dan setelah menanamkan daya tarik wajah wanita itu (“cantik”), penulis memberikan sentuhan sedikit tentang kepribadian wanita itu dengan kutipan yang efektif (Bujono dan Hadad, ed., 1996: 80).

Untuk menghilangkan kata “marah”, penulis menggantinya dengan contoh berikut:

Dalam pidatonya kemarin, ketua partai ABC dengan mata membelalak dan tangan mengepal mengecam pemerintah sebagai tidak bijaksana.

Dari kedua contoh di atas, si wartawan tidak memberikan penilaian melainkan menggambarkan apa yang ia lihat:

3) Membubuhkan aspek-aspek relevan

Berita objektif adalah berita yang seimbang. Karena itu, sebuah kisah berita (*news story*) haruslah lengkap. Jika hasil penglihatannya dirasakan tidak lengkap, maka ia harus mencari bahan-bahan pelengkap dengan hasil indera pendengaran, dalam hal ini mewawancarai seseorang yang erat hubungannya dengan peristiwa yang diberitakan. Kalau fakta-fakta yang melatarbelakangi telah dapat dikumpulkan, maka penekanannya harus tepat pada setiap fakta, lalu menghubungkannya secara relevan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga merupakan keseluruhan yang serasi. Keseimbangan adalah soal penekanan (*emphasis*) dan kelengkapan (*completeness*).

Dalam hubungan dengan soal objektivitas ini, menarik apa yang dikemukakan Kaarle Nordenstreng (1984: 247, 456) dalam bukunya *The Mass Media Declaration of UNESCO*, yang menyinggung tentang Deklarasi Meksiko (1980), di mana wakil-wakil jurnalistik internasional dan regional mengusulkan untuk kode etik internasional. Pada prinsipnya mereka mendorong dedikasi bagi realitas objektif, antara lain: “...*fakta* dilaporkan secara hati-hati dalam konteks yang tepat, menunjukkan penekanannya, dengan memanfaatkan kemampuan kreatif wartawan sebagaimana mestinya, sehingga publikasi

disugui bahan yang memandai untuk memudahkan pembentukan gambaran yang akurat dan menyeluruh mengenai dunia di mana asal-usul, sifat, serta esensi kejadian, proses, dan pernyataan mengenai berita, dipahami seobjektif mungkin."

"Objektivitas", demikian kata Bernard Roshco, "tidak bersemayam di dalam kualitas hasilnya, melainkan dalam penanganannya. Objektivitas merupakan suatu nilai dan karenanya memerlukan suatu kewajiban etika untuk berlaku objektif; hal itu merupakan suatu metode dan karenanya memerlukan dipergunakannya teknik-teknik untuk dipergunakan sebagai sarana bagi tujuan-tujuan lain. Karena itu, dalam penulisan berita maupun dalam pekerjaan riset ilmiah, adalah objektif untuk membuktikan kesalahan, namun tidak objektif untuk memalsukan."

Jadi, kewajiban etis pertama pers adalah untuk menyajikan apa yang telah terjadi dengan sesetia mungkin, keadaan yang sebenarnya, dengan selengkap-lengkapnya, dengan seimbang, dengan teliti, dengan tepat (Magnis-Suseno, 1988: 123-124).

Apakah itu mungkin? Dalam hal ini kita semua tentu tak begitu naif hingga tak mengetahui bahwa tidak mungkin suatu kejadian, suatu peristiwa, dapat dilaporkan dengan seratus persen sesuai. Pers semacam itu tak mungkin ada, pun tak mungkin bisa. Setiap pemberitaan mengandaikan pilihan, pembobotan, penentuan cara penyajian, pendek kata mengandaikan penilaian dari pihak penyaji. Namun hal itu tidak menjadi apa.

Sudah barang tentu setiap penerbitan pers mesti memberi penilaian dalam menyajikan suatu berita, sepanjang kriteria penilaian itu sendiri bisa diketahui oleh pembaca. Dalam hubungan ini, secara subjektif, pihak pers sendiri harus berupaya memberikan informasi yang sebenar-benarnya. Dengan kata lain, pers sendiri harus menolak pertimbangan oportunistik dalam penyajian kebenaran. Pers wajib menyajikan apa yang oleh redaksi sendiri dinilai paling relevan, paling perlu dilaporkan, dengan cara pelaporan yang paling dapat memberi informasi kepada publik sesuai dengan kenyataan.

Secara kasar, seperti ungkapan Magnis-Suseno: pers jangan bohong, entah seratus persen, entah setengah-setengah. Menyeleweng dari kebenaran secara sadar, demi oportunistik atau ideologis, adalah suatu pelanggaran berat terhadap etika pers.

Beberapa Pedoman Peliputan

Pers dalam dirinya memang seperti pisau bermata dua. Dia memiliki daya dukung yang sangat tinggi, tapi juga mempunyai kemampuan destruktif yang mahadahsyat. Ia bisa menjadi tali pengikat bagi persatuan dan kesatuan, tapi juga bisa menjerus sebagai alat bagi terjadinya perpecahan dan keresahan sosial. Itulah sebabnya maka pelbagai pedoman penulisan atau petunjuk peliputan kian diperlukan.

Berikut ini dipaparkan beberapa contoh mengenai petunjuk liputan di Amerika Serikat yang dirumuskan Dr. Theodore Kruglak dan Dr. Kenneth Hartwood dari University of Southern California setelah mendengar pendapat-pendapat para tokoh pers (Assegaff, dalam *Reporter* No.5/1989):

1) Hindari penekanan mengenai kisah-kisah yang menceritakan ketegangan masyarakat ketika ketegangan dari suatu peristiwa tertentu tengah berkembang. Tanyakan kepada yang berwajib apakah peristiwa menegangkan yang tengah berkembang tersebut direncanakan guna mengganggu ketertiban masyarakat atau untuk tujuan lainnya. Laporkan petunjuk yang berwajib itu mengenai peristiwa tersebut.

2) Laporan-laporan yang ditujukan kepada masyarakat umum, tidak boleh menyebutkan secara pasti lokasi, persimpangan jalan, sejumlah nama jalan, sampai pihak yang berwenang mempunyai tenaga atau personel yang cukup untuk mengendalikan situasi.

3) Laporan seketika atau laporan langsung harus menghindari kesimpangsiuran penafsiran mengenai desas-desus yang tengah berhembus, serta menghindari penggunaan pernyataan-pernyataan yang tidak jelas juntrungannya.

4) Hindari laporan-laporan mengenai insiden-insiden yang remeh-temeh.

5) Karena penggunaan kamera, lampu kilat, atau mikropon secara serampangan dapat menimbulkan efek penonjolan, para pemakai alat-alat tersebut mesti berhati-hati ketika berada di tempat huru-hara. Karena, kejadian itu juga bisa mendatangkan bahaya, atau bahkan kematian kepada para peliput berita, maka kehadiran mereka tidak boleh mencolok. Kendaraan-kendaraan yang tidak bertanda, sebaiknya dipergunakan untuk penyelidikan awal mengenai peristiwa tersebut.

6) Penjelajahan di daerah krisis dapat menimbulkan gangguan. Para reporter harus mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan markas terdekat dari area.

7) Para peliput yang berada di tempat yang situasinya eksplosif, atau bisa meledak, harus menghindari laporan atau wawancara dengan "para penghasut".

8) Para peliput harus menginformasikan terlebih dahulu siapa yang diwawancarai.

9) Kepala-kepala berita dan siaran-siaran yang menghebohkan, serta bentuk-bentuk sensasi lainnya, harus dihindari dalam majalah, surat kabar, radio, dan televisi.

10) Seluruh media pemberitaan harus berusaha bahwa hanya para peliput yang berpengalamanlah yang dikirim ke tempat terjadinya huru-hara.

11) Laporan-laporan tidak boleh menggunakan kalimat-kalimat yang berlebihan, yang dapat menyulut konflik lebih luas, atau menyebabkan gangguan baru di tempat kekacauan.

12) Data laporan yang ingin digunakan para wartawan secara leluasa harus ditulis dalam keadaan tenang, dengan menggunakan kalimat yang tidak berbelit-belit agar tidak timbul hasutan akibat disampaikannya informasi itu kepada masyarakat umum. Laporan yang jujur dan tidak memihak adalah laporan yang terbaik.

13) Para peliput tidak boleh melaporkan secara rinci bagaimana suatu senjata diperoleh, dibuat, atau dipergunakan.

14) Para peliput tidak boleh menunjuk secara persis lokasi pos-pos komando pejabat pemerintah, polisi, unit pemadam kebakaran, atau satuan-satuan militer.

15) Setiap peliput dan teknisi harus memelihara selera yang baik (menghindari selera *rendahan*) dan akal sehat. Hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan masyarakat menuntut bahwa persaingan harus dinomorduakan setelah keselamatan umum.

Meskipun petunjuk liputan tersebut berkaitan dengan kerusuhan rasial dan berlaku di Amerika Serikat, namun kiranya berguna bagi pers Indonesia untuk bahan pengembangan perumusan pedoman liputan tentang pelbagai hal yang relevan. ●

Daftar Pustaka

Adinegoro, *Publisistik & Djurnalistik*, Jilid II, Gunung Agung, Djakarta, 1961.

Assegaff, Dja'far H., "Pedoman Liputan Pers", *Reporter* No.5, Oktober-November 1989, hlm 35-36, 48.

Bachtiar, Harsja W. (ed.), *Percakapan dengan Sidney Hook tentang 4 Masalah Filsafat*, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1986.

Bujono, Bambang dan Toriq Hadad (ed.), *Seandainya Saya Wartawan Tempo*, Institut Studi Arus Informasi dan Yayasan Alumni Tempo, Jakarta, 1996.

Effendi, Onong Uchjana, *Dinamika Komunikasi*, Remadja Karya CV, Bandung, 1986.

Hamami, Abbas, "Kebenaran Ilmiah", dalam Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM, *Filsafat Ilmu*, Liberty & YP Fakultas Filsafat UGM, Yogyakarta, 1996, hlm. 112-124.

Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*, Paramadina, Jakarta, 1996.

Hoernie, R.F.A., *Studies in Philosophy*, George Allen & Unwin Ltd., London, 1952.

Johannesen, Richard L., *Etika Komunikasi*, Editor Dedy Djamaluddin Malik dan Deddy Mulyana, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1996.

-
- Katsoff, L.O., *Pengantar Filsafat*, Penerjemah Soejono Soemargono, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1986.
- Langeveld, M.J., *Menuju Kepemikiran Filsafat*, Penerjemah G.J. Claessen, PT Pembangunan, Jakarta, tanpa tahun.
- Lincoln, Yvonna S. & Egon G.Guba, *Naturalistic Inquiry*, Sage Publications Inc., Beverly Hills, California, 1985.
- Magnis-Suseno, Franz, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia, Jakarta, 1988.
- Medawar, P.B., *Nasihat untuk Ilmuwan Muda*, Penerjemah Andi Hakim Nasution, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1990.
- Media Indonesia*, "Pers yang Arif", Editorial, 10 Februari 1993.
- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, Penerbit Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.
- Nordenstreng, Kaarle, *The Mass Media Declaration of UNESCO*, Ablex, Norwood, NJ, 1984.
- Patton, Michael Quinn, *Qualitative Evaluation and Research Methods*, Second Edition, Sage Publication Inc., Newbury Park, California, 1990.
- Peursen, C.A. van., *Fakta, Nilai, Peristiwa: tentang Hubungan Ilmu Pengetahuan dan Etika*, Penerj. Sonny Keraf, PT Gramedia, Jakarta, 1990.
- , *Orientasi di Alam Filsafat*, Penerjemah Dick Hartoko, PT Gramedia, Jakarta, 1991.
- Rivers, William L. Dan Cleve Mathews, *Etika Media Massa dan Kecenderungan untuk Melanggarnya*, Penerjemah Arwah Setiawan dan Danan Priyatmoko, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Shihab, M. Quraish, "Hari Pers", *Republika*, 9 Februari 1993.
- Suparlan, Parsudi, "Kata Pengantar", dalam Shils, Edward, *Etika Akademis*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993, hlm viii-xix.
- Suriasumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Tim Editor Mitra Utama, *Percikan Permenungan, Kumpulan Kata-kata Mutiara dari Segala Abad dan Tempat*, Mitra Utama, Jakarta, 1996.
- Wonohito, M., *Berita*, NV BP Kedaulatan Rakjat, Jogjakarta, 1960.

